

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIZ
NIM : 172022032
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis magister yang berjudul: ***Hak Ijbar Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*** (Studi Komparasi) saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) dan diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, sepenuhnya merupakan hasil tulisan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam tesis ini telah saya sebut kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi tesis ini hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dan konsekuensinya ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2021

ABDUL AZIZ
NIM : 172022032

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
(Studi Komparasi)

Nama : ABDUL AZIZ

NIM : 172022032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian : 4 Juni 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister hukum.

Serang, 6 Juni 2021
Direktur,

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.
NIP.19590810 199003 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER**

Tesis berjudul : **HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
(Studi Komparasi)

Nama : ABDUL AZIZ

NIM : 172022032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. H. Anis Fauzi, M.SI (.....)

Sekretaris : Dr. Purnama Rika Perdana, M.Hum (.....)

Penguji I : Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Muhamad Ishom, MA (.....)

Pembimbing I : Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum (.....)

Pembimbing II : Dr. Dedi Sunardi, M. H (.....)

Diuji di Serang pada tanggal 4 Juni 2021
Direktur,

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.
NIP.19590810 199003 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Tesis
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Abdul Aziz
NIM: 172022032

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN “SMH” Banten
di-
Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan revisi penulisan tesis magister yang berjudul: **Hak Ijbar Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia** (Studi Komparasi) yang di tulis oleh:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 172022032
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti ujian tesis magister dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Wassalamu’alikum Wr. Wb

Serang, 11 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum
NIP. 19650227 199003 2 003

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri.”*

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata yang tertulis dalam tesis ini penulis persembahkan umumnya untuk para Pelajar, khususnya UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, dan seluruh masyarakat.

Dalam tesis ini penulis persembahkan pula untuk Umi tercinta, Hj. Ny. Uju Juhariah binti Khatib, yang dengan tulus ikhlas memberikan kasih sayang, pendidikan serta mengajarkan kesabaran serta kejujuran dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Umi telah memberikan segalanya dan taakan pernah mampu untuk penulis membalasnya, karena jeripayah, usaha dan doa'nya yang begitu tulus,

Ayahanda H. Encep Balizi yang dengan cucuran keringat dan ketabahannya serta semangat pantang menyerah telah mengantarkan anak-anak tercintanya dengan bekal ilmu dan semangat untuk hidup di jalan yang benar.

Serta Kakak-kakak penulis yang senantiasa tiada lelah mengasuh, mendidik, sertamen do'akan penulis.

Semoga Allah melindungi, merahmati, member keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada mereka semua amin.

ABSTRAK

Nama: Abdul Aziz, NIM : 172022032, Judul Tesis: *Hak Ijbar dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi)*

Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kodrat lahiriah dan *batiniah* yang relative berbeda dan ditakdirkan untuk berpasangan dan saling melengkapi demi terjalannya ekosistem dan peradaban manusia di muka bumi, sebagai pemersatu hubungan keduanya, Salah satu dari syarat rukun dalam perkawinan adalah keberadaan seorang wali, diantaranya wali mujbir, wali mujbir menjadi kontroversi diantara para imam mazhab. Dalam hal ini pengertian walimujbir adalah hak ijbar wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dar icalon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?2) Bagaimana Implementasi Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

Tujuan penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 2) Untuk Mengetahui Implementasi Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, serta menjadikan data yang Diperoleh dari berbagai sumber literature yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang di bahas. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan metode sesuai buku panduan, dan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang masalah hak *ijbar*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, pemahaman tentang hak *Ijbar* secara teoritis pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban seorang wali dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sama sekali tidak diartikan atau mengarah kepada nikah paksaan secara *ikrah* yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. *Kedua*. Perspektif hukum Islam berangkat dari hadis riwayat Muslim “*Janda lebih berhak atas dirinya disbanding walinya, sedangkan seorang perawan dimintakan perseujuan atas dirinya.*” (HR. Muslim). Secara garis besar menurut Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukkan antara perawan dan janda yaitu izin perawan dengan sikap diamnya, maka yang membedakan melalui bentuk diam adalah ketika ia berbicara. Artinya, adanya urusan yang berbeda antara perawan dan janda. *Ketiga*, Perspektif hukum positif dalam persoalan kawin dengan menyematkan kata “paksa” yang diartikan secara keindonesiaan ini ternyata tidak relevan diimplementasikan di wilayah yang memiliki budaya patriarkhi, sehingga kasus tersebut dijadikan peraturan perundang-undangan perkawinan, salah satu pasal yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai ini tertanam pada undang-undang RI No.1 Tahun 1974 pada pasal (6) tentang syarat-syarat pekawinan. Artinya persetujuan dan kebijakan orang tua tidak berlaku sebelum kedua mempelai tersebut menyetujuinya.

ABSTRAK

Name: Abdul Aziz, NIM: 172022032, Thesis Title: Ijbar Rights in Marriage According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia (Comparative Study)

Allah created two types of human beings, namely male and female, with different physical and inner natures and destined to be paired and complementary for the sake of ecosystem and human civilization on earth, as a unifying relationship between the two. One of the conditions of harmony in marriage is existence. a wali, including wali *mujbir*, wali *mujbir* became a controversy among the priests of the mazhab. In this case the definition of wali *mujbir* is the right of the wali (father and grand father) to force a woman in marriage without the consent of the woman concerned. With this concept, there is the possibility of marriage without the consent of the bride's icalon, provided that the guardian is the father or grand father.

The formulation of the problems in this research are: 1) What is the Ijbar Rights in Islamic Law and Positive Law in Indonesia? 2) How is the Implementation of Ijbar Rights in Islamic Law and Positive Law in Indonesia?

The research objectives of this thesis are: 1) To know how the right of Ijbar in Islamic law and positive law in Indonesia. 2) To Know the Implementation of Ijbar Rights in Islamic Law and Positive Law in Indonesia.

This type of research is library research (library research), which is a study by writing, clarifying, and making data obtained from various literature sources related to the material and focused on the study that is discussed. Data collection techniques by collecting library materials that are continuous (coherent) with the object of discussion under study. The data processing techniques in the literature are collected and processed by the method according to the guide book, and the conclusions of the research. In this study, the authors used books as data sources, especially concerning the issue of ijbar rights.

From this research it can be concluded that first, the understanding of Ijbar's right is the oretically the right and obligation of a guardian with a sense of responsibility to guide and direct his daughter towards a *sakinah mawaddah warahmah* marriage. It does not mean or lead to a forced and irresponsible marriage. *Second*. The perspective of Islamic law departs from the hadist HR. by Muslim "*Widows have more rights over themselves than their guardians, while a virgin is asked for her consent.*" (HR. by Muslim). Broadly speaking, according to Imam Syafi'i, the hadist shows between a virgin and a widow, namely the permission of a virgin with her silence, so what distinguishes through the form of silence is when she speaks. That is, there are different affairs between virgins and widows. Third, the positive legal perspective on the issue of marriage by embedding the word "forced" which is interpreted as Indonesian is apparently irrelevant to be implemented in areas that have a patriarchal culture, so that the case is made into law on marriage, one of the articles stipulating that marriage must be based on The agreement of the two prospective brides is embedded in the Republic of Indonesia Law No.1 of 1974 in paragraph (6) regarding the conditions of marriage. This means that the parents' consent and policies do not apply until the bride and groom agree.

ABSTRAK

Nama: Abdul Aziz, NIM : 172022032, Judul Tesis: ***Hak Ijbar dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparasi)***

Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kodrat lahiriah dan *batiniah* yang relative berbeda dan ditakdirkan untuk berpasangan dan saling melengkapi demi terjalannya ekosistem dan peradaban manusia dimuka bumi, sebagai pemersatu hubungan keduanya, Salah satu dari syarat rukun dalam perkawinan adalah keberadaan seorang wali, diantaranya wali mujbir, wali mujbir menjadi kontroversi diantara para imam mazhab. Dalam hal ini pengertian walimujbir adalah hak ijbar wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dar icalon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?2) Bagaimana Implementasi Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

Tujuan penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 2) Untuk Mengetahui Implementasi Hak *Ijbar* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, serta menjadikan data yang Diperoleh dari berbagai sumber literature yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang di bahas. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan metode sesuai buku panduan, dan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang masalah hak *ijbar*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, pemahaman tentang hak *Ijbar* secara teoritis pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban seorang wali dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menuju perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sama sekali tidak diartikan atau mengarah kepada nikah paksaan secara *ikrah* yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. *Kedua*, Perspektif hukum Islam berangkat dari hadis riwayat Muslim “*Janda lebih berhak atas dirinya disbanding walinya, sedangkan seorang perawan dimintakan perseujuan atas dirinya.*” (HR. Muslim). Secara garis besar menurut Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukkan antara perawan dan janda yaitu izin perawan dengan sikap diamnya, maka yang membedakan melalui bentuk diam adalah ketika ia berbicara. Artinya, adanya urusan yang berbeda antara perawan dan janda. *Ketiga*, Perspektif hukum positif dalam persoalan kawin dengan menyematkan kata “paksa” yang diartikan secara keindonesiaan ini ternyata tidak relevan diimplementasikan di wilayah yang memiliki budaya patriarkhi, sehingga kasus tersebut dijadikan peraturan perundang-undangan perkawinan, salah satu pasal yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai ini tertanam pada undang-undang RI No.1 Tahun 1974 padapasal (6) tentang syarat-syarat pekawinan. Artinya persetujuan dan kebijakan orang tua tidak berlaku sebelum kedua mempelai tersebut menyetujuinya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulispanjatkankepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, serta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT. Dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: ***Hak Ijbar Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*** (Studi Komparasi)

Ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar magister pada Program Magister (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Tesis ini membahas tentang kawin paksa dalam konsep hukum Islam (*Ibar*). Dan di komparasikan dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun begitu tentunya penulis menyadari Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah terkait dengan aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan tugas akhir ini, dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. FauzulIman, M.A., Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum., Direktur Program pascasarjana UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
3. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. DediSunardi, M.H., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah mengarahkan, mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., pembimbing I, yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum, Penguji I, dan Dr. Muhamad Ishom, M.A, Penguji II, yang telah menguji dan membimbing perbaikan tesis penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan segenap kariawan UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan dan dukungan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran serta kritik yang bersifat membangun guna untuk mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis berharap, hasil dari penulisan tesis ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat dan para pelajar di Indonesia dan juga dapat menjadi sumber keilmuan bagi para pembaca khususnya.

Serang, 04 Juni
2021

Abdul Aziz
172022032

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Masalah	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistemantika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
DAN WALI	25
A. Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	28

2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	55
4. Paksaan dalam Perkawinan	62
B. Penegertian Wali dalam Perkawinan.....	65
1. Pengertian Wali	65
2. Syarat Wali	69
3. Kedudukan Wali.....	72
4. Macam-macam Wali dalam Pernikahan.....	75
a. Wali Nasab	75
b. Wali Hakim.....	78
c. Wali Tahkim.....	79
d. Wali Maula	80
e. Wali Mujbir	83
f. Wali Adhol	87
5. Teori <i>Wali Mujbir</i> terhadap Masalah Al-Mursalah.....	91

BAB III HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM.....	104
A. Pengertian Hak <i>Ijbar</i>	104
B. Syarat Berlakunya Hak <i>Ijbar</i>	106
C. Deskripsi Normatif Kawin Paksa	110
D. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Pandangan Ulama.....	114
E. Tinjauan Kemaslahatan dalam Masalah Hak <i>Ijbar</i>	125
F. Hukum Perkawinan Hak <i>Ijbar</i> di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim	129
1. Perkawinan hak <i>ijbar</i> di Indonesia	129

2. Perkawinan hak <i>ijbar</i> di Negara-negara Muslim.....	135
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN	143
A. Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	143
B. Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	178
BAB V PENUTUP	198
A. Kesimpulan.....	198
B. Saran	204

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN